

Identifikasi Produk Unggulan Dan Kontribusi Sektor Tersier Di Kabupaten Madiun

Mintarti Indartini¹, Dian Pratiwi², ML Endang Edi Rahayu³

¹Program Studi Manajemen, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133

E-mail: mintartiindartini@unmer-madiun.ac.id

²Program Studi Manajemen, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133

E-mail: dianpratiwi@unmer-madiun.ac.id

³Program Studi Manajemen, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133

E-mail: endangedirahayu@unmer-madiun.ac.id

Abstract— *Madiun Regency is one of the districts in the western part of East Java which has a very strategic location as a transit city. Then the tertiary sector has a big role / contribution to Gross Regional Domestic Product / PDRB which certainly affects economic growth. This research was carried out in order to: (1) Identify the leading sectors of the tertiary sector in Madiun Regency. (2) Reviewing the contribution of tertiary sector to PDRB of Madiun Regency. and (3) Assessing the base sector which can be used as a mainstay for economic development in Madiun Regency, especially the tertiary sector in 2019 and in the future. The results of research using the analysis of Location Quotient (LQ) are (1) The tertiary sector of Madiun Regency is included in mainstay, superior and prospective criteria. (2) The superior potential of tertiary sector Madiun Regency are the information and communication sector, real estate, education services and health services and social activities. Based on analysis of contribution to the Gross Regional Domestic Product / PDRB of tertiary sector that has largest contribution is the financial and insurance services sector; second is the information and communication sector; and third is government administration, defense and social security is mandatory.*

Keywords—: Tertiary; Superior Product; Location Quotient (LQ); Contribution; Madiun Regency.

I. PENDAHULUAN

Indikator utama dalam sebuah proses kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan baik di tingkat nasional maupun regional adalah adanya pertumbuhan ekonomi, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang efektif dan efisiensi dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Dalam pelaksanaannya kegiatan pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memberikan *multiplier effect* yang sangat besar terhadap sektor-sektor lainnya dan bidang perekonomian secara keseluruhan. Kegiatan pembangunan ekonomi tingkat daerah atau tingkat regional menunjukkan bahwa prioritas utama dalam menggerakkan kegiatan ekonomi nasional yang sangat dipengaruhi oleh adanya kegiatan pembangunan di tingkat regional atau daerah. Proses keberlangsungan pembangunan ekonomi daerah sangat tergantung pada suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dan adanya proses yang berkelanjutan secara terus menerus.

Pembangunan nasional sesuai dengan amanat UU nomor 32 tahun 2004 yang kemudian diperbaharui dengan UU nomor 23 tahun 2014 di mana salah satu isu penting tentang penyelenggaraan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada dasarnya adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya di daerah. Dimana peran serta pemerintah dan masyarakat sangat penting sekali dalam pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerataan pembangunan di seluruh tanah air mulai dari daerah yang memiliki potensi maju, berkembang dan terbelakang perlu untuk ditingkatkan demi tercapainya pembangunan wilayah secara nasional.

Perkembangan sektor-sektor perekonomian akan mengalami pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier dalam kontribusinya terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) yang ditandai dengan pergeseran peranan atau perubahan sektor primer (pertanian dan pertambangan) terhadap produk domestik bruto yang semakin berkurang diikuti dengan pergeseran peranan sektor sekunder (industri, listrik gas air, dan konstruksi) dan sektor tersier (perdagangan hotel restoran, pengangkutan komunikasi, keuangan, dan jasa) yang cenderung meningkat [Ananta, 1993]. Sauri dan Indrawati (2018) telah melakukan penelitian di Kota Banten bahwa sektor tersier memiliki laju pertumbuhan kontribusi yang paling tinggi terhadap PDRB diatas sektor primer dan sektor sekunder.

Rahayu (2010) bahwa peran sektor tersier dalam mendukung PDRB agregatif Kabupaten Madiun didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. peran sektor perdagangan, hotel dan restoran untuk tahun 2008 sebesar 27,49 persen, diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 15,13 persen. Secara total peran sektor tersier tahun 2008 sebesar 49,98 persen. Hastuti (2017) menunjukkan bahwa di Kabupaten Madiun sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi berdasarkan analisis

Shift Share *Esteban Marquillas* adalah sektor Pertanian; sektor Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang; sektor Konstruksi; sektor Informasi dan Komunikasi; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Sektor Administrasi Pemerintahan; serta Jasa Lainnya.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Khrisna dkk (2016) menunjukkan bahwa hasil analisis *Shit Share* yang telah dilakukan terhadap PDRB Kabupaten Madiun dapat diketahui bahwa Listrik, Gas & Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, real estate dan Jasa Perusahaan tumbuh lambat dan memiliki daya saing keunggulan komparatif. Pertanian; Jasa-Jasa tumbuh cepat namun memiliki daya saing keunggulan komparatif. Pertambangan; Industri Pengolahan tumbuh lambat dan tidak memiliki daya saing keunggulan komparatif. Sedangkan Berdasarkan hasil analisis perbandingan PB dan SLQ di semua sektor PDRB dapat diketahui bahwa 1) Sektor Unggulan : Bangunan; Perdagangan, Hotel & Restoran; 2) Sektor Berkembang : Listrik, Gas & Air Bersih; Pengangkutan dan Komunikasi; 3) Sektor Andalan : Pertanian; Jasa-jasa dan 4) Sektor Tertinggal : Pertambangan & Penggalan; Industri Pengolahan; Keuangan. Beberapa peneliti tersebut telah membuktikan bahwa sistem perekonomian Indonesia bercorak agraris namun sektor sekunder dan sektor tersier dapat memberikan kontribusi terhadap PDP di atas sektor primer.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian tersebut maka identifikasi mengenai produk unggulan di sektor tersier sangat diperlukan untuk perencanaan pengembangan yang akan datang terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang akan berdampak pada berubahnya potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh wilayah. Terutama guna meningkatkan pendapatan masing-masing daerah dituntut harus mampu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalan potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat adalah jalan terbaik, karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah maka pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah tidak akan mencapai hasil yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber kehidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002).

II. METODE PENELITIAN

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor/sub sektor ke dalam sektor/sub sektor basis dan non basis yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan relatif (Arsyad; 1999).

Secara matematika, teknik LQ dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{X_r / RV_r}{X_n / RV_n}$$

Keterangan :

LQ : Besarnya kuosien lokasi/*Location Quotient* sektor tersier Kabupaten Madiun

X_r : Jumlah pendapatan (PDRB) sektor tersier Kabupaten Madiun

X_n : Jumlah pendapatan (PDRB) sektor tersier Propinsi Jawa Timur

RV_r : Jumlah total pendapatan (PDRB) sektor tersier Kabupaten Madiun

RV_n : Jumlah total pendapatan (PDRB) sektor tersier Propinsi Jawa Timur

Kriteria :

$LQ > 1$: sektor/sub sektor tersebut merupakan sektor basis dan memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Madiun.

$LQ < 1$: sektor/sub sektor tersebut merupakan sektor non basis dan tidak memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Madiun.

B. Analisis *SLQ* dan *DLQ*

1. *SLQ* (Static Location Quotient)

Indeks yang digunakan untuk mengukur suatu sektor yang merupakan sektor unggulan (sektor basis) atau tidak bagi suatu daerah. Pendekatan ini memerlukan data yang berasal dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik yang berasal dari kabupaten ataupun tingkat provinsi.

2. *DLQ* (Dynamic Location Quotient)

Adalah modifikasi dari SLQ, dengan mengakomodasi faktor laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi dari waktu ke waktu. Dari dua jenis analisis LQ diatas, hasilnya kemudian digabungkan sehingga membentuk suatu kuadran untuk membagi empat kuadran yang berbeda atas sektor-sektor yang dianalisis.

C. Analisis Persentase nilai PDRB masing-masing sektor

Kontribusi/peran sektor tersier terhadap PDRB agregatif Kabupaten Madiun menggunakan teknik persentase nilai PDRB masing-masing sektor tersier. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai PDRB sektor tersier terhadap PDRB Agregatif, dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Kontribusi masing-masing sektor tersier} = \text{Nilai PDRB sub sektor tersier}}{\text{Nilai PDRB Agregatif sektor tersier}} \times 100\%$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis LQ pada Tabel.1 menunjukkan bahwa terdapat pada sektor tersier Kabupaten Madiun yang mempunyai LQ > 1 yaitu Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Adm.Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Sektor-sektor ini disebut sektor basis.

Sedangkan sektor tersier Kabupaten Madiun yang mempunyai LQ < 1 yaitu Transportasi dan Pergudangan; Penyedia Akomodasi dan makan minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; dan Jasa Perusahaan. Sektor-sektor ini disebut sektor non basis.

Sedangkan gambar 1 bahwa semua sektor tersier tidak ada yang masuk kriteria tertinggal. Beberapa sektor tersier di Kabupaten Madiun yang masuk pada kriteria sektor andalan adalah Transportasi dan pergudangan, Penyedia akomodasi dan makan minum, Jasa keuangan dan asuransi serta Jasa Perusahaan. Sektor Adm pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial Wajib dan jasa lainnya masuk kriteria prospektif. Sedangkan sektor tersier yang masuk kriteria unggulan adalah Informasi dan komunikasi, Real estate, Jasa pendidikan serta Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel 1. Analisis LQ (*Location Quotient*) Sektor Tersier Kabupaten Madiun

Kategori	Uraian	DLQ	SLQ
H	Transportasi dan Pergudangan	1,44	0,41
I	Penyedia Akomodasi dan makan minum	1,17	0,41
J	Informasi dan Komunikasi	1,59	1,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,39	0,92
L	Real Estate	1,15	1,00
M, N	Jasa Perusahaan	1,09	0,39
O	Adm.Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	0,59	2,73
P	Jasa Pendidikan	1,03	1,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,93	1,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			

Gambar 1. Kuadran Penilaian Hasil Analisis SLQ dan DLQ Kabupaten Madiun

Kriteria	SLQ<1	SLQ>1
DLQ>1	ANDALAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi dan pergudangan 2. Penyedia akomodasi dan makan minum 3. Jasa keuangan dan asuransi 4. Jasa perusahaan 	UNGGULAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan komunikasi 2. Real estate 3. Jasa pendidikan 4. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
DLQ<1	TERTINGGAL	PROSPEKTIF <ol style="list-style-type: none"> 1. Adm pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial Wajib 2. Jasa lainnya

A. Sektor Informasi Dan Komunikasi

Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi di Kabupaten Madiun telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Masyarakat dahulu masih banyak yang menggunakan mesin tik, telegram, jasa pos maupun telepon konvensional. Namun seiring dengan inovasi dan perkembangan teknologi, hal tersebut telah ditinggalkan dan masyarakat telah beralih menggunakan notebook, telepon selular, internet, I-Pad dan peralatan dengan teknologi canggih lainnya.

Di dunia bisnis atau pada level usaha kecil menengah seperti UMKM sampai perusahaan terlihat semakin berkembang. Penggunaan teknologi menjadi sangat penting dan dominan sebagai sarana komunikasi, menyampaikan informasi, maupun menjalankan bisnis.

Pergerakan ekonomi yang terjadi secara tidak langsung turut dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi mendorong pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi/peranan yang besar pada pertumbuhan sektor perekonomian di Indonesia. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan era globalisasi, inovasi sebagai penemuan produk baru atau efisiensi produksi dari produk yang telah ada, telah menyebabkan munculnya perubahan pada teknologi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication Technology /ICT*) merupakan teknologi yang paling berkembang dengan pesat secara global yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi, dan teknologi tersebut telah menjadi bagian dari infrastruktur untuk berbagai sektoral kehidupan yang tidak akan mampu menghindari bias dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di Indonesia telah menempatkan TIK sebagai salah satu bagian dari penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Perkembangan TIK di Indonesia telah masuk secara meluas di segala aspek kehidupan.

B. Sektor Real Estate

Sektor real estate merupakan sektor unggulan kedua setelah sektor informasi dan komunikasi di Kabupaten Madiun jika dilihat pada sektor tersier. Pertumbuhan ekonomi pada sektor real estate di Kabupaten Madiun mempunyai peranan yang strategis. Hal ini disebabkan karena real estate berkontribusi terhadap perekonomian melalui Industri dan juga bisa mengundang investasi baru yang datang ke Kabupaten Madiun. Adityaswara (2017) mengatakan bahwa properti merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai (*multiplier effect*) serta *backward linkage* yang cukup besar kepada sektor-sektor ekonomi lainnya. Disini terlihat bahwa peran pertamanya adalah *backward linkage*, yaitu maksudnya adalah properti juga bisa berkontribusi terhadap perekonomian melalui Industri. Lalu peran properti selanjut yakni *forward linkage*. Properti juga bisa mengundang investasi baru yang datang masuk pada suatu daerah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir sektor konstruksi dan real estate di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik walaupun dengan tren pertumbuhan melambat, searah dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk sektor real estate pertumbuhan sudah terlihat mulai membaik sejak triwulan III 2013. Kontribusi sektor konstruksi dan real estate terhadap PDB cenderung tetap pada kisaran 9,5 persen untuk konstruksi dan 3 persen untuk real estate. Sektor properti mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8,0 juta orang atau 6,62 persen dari seluruh total tenaga kerja yang mana sebanyak 7.7 juta (6.38 persen) bekerja di sektor konstruksi dan 294.392 orang (0.24 persen) di sektor real estate. Di negara-negara maju, sektor real estate peranannya lebih besar dibandingkan sektor konstruksi. Sedangkan di Indonesia, peran sektor real estate masih lebih kecil dibandingkan sektor konstruksi sehingga sektor real estate masih sangat terbuka untuk dikembangkan. (Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal, 2019).

Di Kabupaten Madiun memiliki luas lahan sebesar 101.086 Ha maka masih sangat dimungkinkan sektor real estate sangat terbuka untuk terus berkembang. Kontribusi sektor real estate ditandai dengan adanya berbagai kegiatan pembukaan lahan-lahan baru untuk perumahan semakin meluas, ruko, pabrik-pabrik baru, perkantoran baru baik instansi pemerintah maupun swasta. Misalnya Kantor Pemerintah Kabupaten Madiun pindah ke Mejayan, hal ini tentunya dampak yang ditimbulkan dari sektor real estate cukup besar. Tentunya akan dibuka lahan-lahan baru untuk perumahan, ruko, perkantoran dan lain-lain tentunya akan menarik para investor baru yang masuk ke Mejayan, karena ibu kota Kabupaten pindah lokasi. Meskipun sisi lain telah berdampak mengurangnya lahan pertanian karena telah beralih fungsi untuk tempat-tempat bangunan baru.

C. Sektor Jasa Pendidikan

Sektor jasa pendidikan Kabupaten Madiun masuk kriteria unggulan karena Komitmen pemerintah Kabupaten Madiun terhadap pendidikan memang relatif tinggi. Ini semua dibuktikan secara riil dengan mengalokasikan anggaran pendidikan secara memadai. Dimana bahwa peran jasa pendidikan memegang peranan vital dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia. Keberhasilan jasa pendidikan di Kabupaten Madiun ditandai pula dengan adanya pelayanan yang berkualitas kepada para pengguna jasa pendidikan baik (siswa, mahasiswa/peserta didik), banyak tenaga kerja yang memiliki skill khusus dan dilengkapi dengan adanya infrastruktur (peralatan) yang lengkap.

1. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial

Adanya pelayanan kesehatan semakin mengarah ke pasar yang ditandai oleh semakin banyaknya pelayanan kesehatan yang menjadi *private-goods* rumah sakit pemerintah sedang bergerak dari lembaga birokrasi ke lembaga usaha. Di Kabupaten Madiun juga telah banyak berdiri rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta tersebut bergerak dari lembaga misionaris dan kemanusiaan menuju ke lembaga yang didasari oleh konsep usaha dengan sistem pelayanan kesehatan diperbaiki dengan berbagai macam tindakan, termasuk melengkapi SDM, khususnya dokter spesialis.

Ini menandakan bahwa pembangunan di Kabupaten Madiun sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami peningkatan dengan penyediaan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Fasilitas kesehatan adalah tersedianya fasilitas kesehatan yang mudah diakses dan murah bagi lapisan masyarakat. Indikator akses pelayanan kesehatan dapat dilihat dari presentasi penduduk berobat jalan menurut tempat berobat jalan. Karena ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk yaitu jarak tempat tinggal dengan tempat pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatan serta jenis pelayanan kesehatan. Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Hal ini tidak lepas pula bahwa masyarakat Kabupaten Madiun telah menyadari akan arti pentingnya kesehatan untuk rutin cek kesehatan.

2. Analisis Kontribusi sektor tersier terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Sektor-sektor yang membentuk sektor tersier adalah sektor transportasi dan Perdagangan; Penyedia Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi, Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Akuntansi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Adm.Pemerintah, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib; jasa Pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan Jasa lainnya. Besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor tersier perekonomian Kabupaten Madiun atas dasar harga berlaku dari tahun 2012 – 2017 ditunjukkan dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 2. Kontribusi Sektor-Sektor Tersier Terhadap PDRB Agregatif Tersier
Tahun 2012 - 2017

Kategori	Uraian	Kontribusi					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
H	Transportasi dan Pergudangan	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
I	Penyedia Akomodasi dan makan minum	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
J	Informasi dan Komunikasi	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.52	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10
L	Real Estate	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
M, N	Jasa Perusahaan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
O	Adm.Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20
P	Jasa Pendidikan	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08

Hasil analisis sektor tersier terhadap Produk Domestik Regional Bruto Agregatif Tersier jika diambil 3 (tiga) sektor yang berkontribusi terbesar pertama adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; kedua adalah sektor informasi dan komunikasi; dan ketiga Adm.Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib.

D. Sektor Jasa Keuangan Dan Asuransi

Tahun 2013 sampai tahun 2016, OJK telah menerbitkan regulasi di sektor jasa keuangan sebanyak 142 Peraturan OJK dan 119 Surat Edaran OJK. Serta meluncurkan berbagai program strategis seperti Laku Pandai, Jaring, Layanan Keuangan Mikro, Simpanan Pelajar, Sistem Perizinan, dan Registrasi Terintegrasi, Tim Percepatan Akses Keuangan Pemerintah Daerah (TPAKD) dan Satgas Waspada Investasi. (<https://www.wartaekonomi.co.id/read131654/tumbuh-pesat-kontribusi-sektor-keuangan-meningkat-terhadap-pdb.html>).

Adanya kebijakan regulasi pemerintah di sektor jasa keuangan tersebut yang menyebabkan meningkatnya peran sektor jasa keuangan terhadap PDRB agregatif tersier yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan sektor asuransi, pemerintah telah menetapkan peraturan permodalan yang lebih keras, memperbaiki regulasi dan pengawasan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dari pihak regulator. Peran industri asuransi baik berdasarkan skala perorangan maupun secara nasional, asuransi telah banyak menawarkan tata kelola resiko secara tepat serta memberikan perlindungan terhadap pihak yang teransuransikan, memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan individu atau organisasi untuk percaya diri melakukan aktivitas ekonomi, menstimulasi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi melalui skema jangka panjang. Maka sektor jasa asuransi semakin memiliki kontribusi yang penting terhadap Produk Domestik Regional Bruto terutama terhadap laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

E. Sektor Informasi Dan Komunikasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan sektor informasi dan komunikasi dekade tahun 2012 hingga 2017 adalah relatif stabil yaitu rata-rata berkontribusi sebesar 0,23 % terhadap PDRB Agregatif sektor tersier Kabupaten Madiun.

Di dunia bisnis atau pada level usaha kecil menengah seperti UMKM sampai perusahaan terlihat semakin berkembang. Permintaan terhadap jasa teknologi menjadi sangat penting dan dominan sebagai sarana komunikasi, menyampaikan informasi, maupun menjalankan bisnis.

F. Sektor Adm.Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib

Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan sektor Adm.Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib dekade tahun 2012 hingga 2017 adalah rata-rata berkontribusi sebesar 0,20 % terhadap PDRB Agregatif sektor tersier Kabupaten Madiun.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah serta jaminan sosial.

Meningkatnya angka pertumbuhan dikabupaten Madiun terutama terjadi pada sektor administrasi pemerintahan karena pemerintah berhasil mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi yang mempercepat kinerja di sektor administrasi pemerintahan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil Analisis *Location Quotient* (DLQ dan SLQ) dapat diambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini: (a) Sektor tersier Kabupaten Madiun masuk pada kriteria andalan, unggulan dan prospektif. (b) Sektor tersier di Kabupaten Madiun yang masuk pada kriteria sektor andalan adalah Transportasi dan pergudangan, Penyedia akomodasi dan makan minum, Jasa keuangan dan asuransi serta Jasa Perusahaan. Sektor Adm pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial Wajib dan jasa lainnya masuk kriteria prospektif. (c) Sektor tersier yang masuk kriteria unggulan adalah Informasi dan komunikasi, Real estate, Jasa pendidikan serta Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
2. Berdasar hasil analisis kontribusi Sektor tersier yang berkontribusi terbesar pertama adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; kedua adalah sektor informasi dan komunikasi; dan ketiga Adm. Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib.

B. Saran

1. Sebaiknya prioritas utama Pemerintah Kabupaten Madiun dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan wilayah adalah sektor unggulan dengan kebijakan yang strategis guna mempercepat pertumbuhan ekonominya.
2. Sektor tersier adalah sektor jasa yang menciptakan produk tak berbentuk berupa layanan kepada konsumennya. Di Kabupaten Madiun khususnya bahwa sektor tersier jika dilihat dari perkembangan semakin meningkat dari tahun ke tahun meskipun kontribusi terhadap PDRB lambat tidak sebesar sektor yang lainnya. Karena sebagian besar sektor jasa mengalami kelebihan permintaan dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat, tumbuhnya masyarakat kelas menengah, membuat permintaan akan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi menjadi semakin besar. Perlambatan pertumbuhan yang dialami oleh sektor jasa perlu disikapi secara strategis oleh pemerintah. Yaitu (a) *Pertama*, memperbaiki sistem sekolah vokasi dan sertifikasi tenaga kerja sektor jasa. Sumber daya manusia adalah dasar dari sektor jasa, sehingga kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Perbaikan mutu sekolah vokasi, penambahan kapasitas pelatihan, dan proses sertifikasi tenaga kerja. (b) *Kedua*, mendorong investasi baru dalam sektor jasa. Berdasarkan analisis yang dilakukan, sebagian besar sektor jasa mengalami kelebihan permintaan (Presisi, 2015). Semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat, tumbuhnya masyarakat kelas menengah, membuat permintaan akan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi menjadi semakin besar. (c) *Ketiga*, pemerintah perlu meninjau ulang untuk pengenaan PPN 10% untuk ekspor jasa. Pengenaan PPN 10% untuk selain tiga sektor tersebut akan mengurangi daya saing Indonesia, karena banyak negara sudah mengenakan PPN 0% atas ekspor jasa terutama untuk jasa-jasa seperti financial center, jasa konsultan, jasa akuntansi, jasa call center, dan jasa-jasa lainnya yang dapat menambah penyerapan tenaga kerja.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris. 1993. Ciri Demografis Kualitas Penduduk Dalam Pembangunan Ekonomi. Lembaga Demografi FEUI. Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomidiera. BPFE. Yogyakarta.
- Ambardi, Urbanus M dan Socia Prihawanoro. 2002. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Pusat Pengkajian Kebijakan Pengembangan Wilayah (P2KTPW – BPPT). Jakarta.
- Artikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi [Kamis \(18/10/20\)](#)
- Badan Pusat Statistik. 2011. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2007 – 2011.
- BPS Jakarta badan Pusat Statistik. 2017. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2011-2016.
- BPS Propinsi Jawa Timur tahun 2017.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sektor_Tersier Tgl 17 Januari 2019, <http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20160927112320261370982> (<https://ekbis.sindonews.com/read/1233551/179/bi-sektor-properti-dorong-perekonomian-nasional-1503576786>)
- Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal. 2019. Dampak Perkembangan Sektor Properti Terhadap Perekonomian Daerah: Optimalisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Dari Sektor Properti. 22 Januari 2019.
- Krisna, Wayan Nanda dkk. 2016. Pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Agropolitan Kabupaten Madiun.
- Portal Berita Ekonomi. 2019. Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi (<https://www.wartaekonomi.co.id/read131654/tumbuh-pesat-kontribusi-sektor-keuangan-meningkat-terhadap-pdb.html>)
- Rachbini, Didik J. 2005. Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Rahayu, Djumhariati, dan Mulyati. 2010. Kontribusi Sektor Primer, Sektor Sekunder Dan Sektor Tersier Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Agregatif Kabupaten Madiun. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Volume 11 Nomor 2 September 2010. Universitas Merdeka Madiun.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Sauri, Sofyan Dan Indrawati, Dini. 2018. Analisis Peranan Sektor Primer-Sekunder-Tersier Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Provinsi Banten Tahun 2007- Tahun 2017). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta

Todaro, Michael P dan Stephen, C. Smith. 2008. Pembangunan Ekonomi. Edisi kesembilan. Erlangga. Jakarta.

Tarigan, Robinson. 2002. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. PT. Bumi aksara. Jakarta

Usya, Nurlatifa. 2006. Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan Di Kabupaten Subang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Bogor.